

# **RESTRUKTURISASI KURIKULUM S-1 PJKR FIK UNY BERDASARKAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPETENSI LULUSAN DAN MASUKAN MASYARAKAT**

**Soni Nopembri, Erwin Setyo K, Herka Maya jatmika, Tri Ani Hastuti  
Universitas Negeri Yogyakarta**

## **Abstrak**

Struktur kurikulum Prodi S-1 PJKR yang dimuat dalam kurikulum FIK tahun 2002 belum dapat merefleksikan begitu pentingnya kompetensi seorang guru pendidikan jasmani dan juga belum memfasilitasi kebutuhan masyarakat pengguna (*stakeholders*). Keberadaan berbagai perangkat hukum dan acuan dasar penyusunan kurikulum LPTK mengisyaratkan perlunya kurikulum disusun berdasarkan kompetensi dan kebutuhan masyarakat. Munculnya Undang-undang Guru dan Dosen telah memberikan arti pentingnya kompetensi dan juga kebutuhan masyarakat dalam menyusun sebuah kurikulum calon guru. Merestrukturisasi kurikulum prodi S-1 PJKR agar relevan dengan kompetensi dan kebutuhan masyarakat adalah hal perlu dilakukan saat ini. Dimulai dengan perubahan nama program studi menjadi Program Studi S-1 Pendidikan jasmani. Kemudian penyelenggaraan program studi itu sendiri yang disesuaikan dengan spesialisasi tingkatan pendidikan (dasar, menengah). Visi, Misi, dan Tujuan dari penyelenggaraan tiap program harus ditinjau kembali. Hal terakhir dalam perubahan pengelompokkan mata kuliah yang didasarkan atas dasar kompetensi dan kebutuhan masyarakat.

**Kata kunci: kurikulum, struktur, relevansi, kompetensi, kebutuhan masyarakat**

## **PENDAHULUAN**

Kurikulum S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PJKR) merupakan bagian dari kurikulum FIK tahun 2002 yang merupakan hasil pengembangan kurikulum FPOK sebagai salah satu konsekuensi perubahan Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta. Perubahan ini membawa pada di kembangkannya kurikulum FIK tahun 2002 menjadi kurikulum yang bersifat "Eksakta". Penalaran ini mengakibatkan pengembangan Kurikulum FIK tahun 2002 lebih mengarah pada pengembangan Ilmu Keolahragaan yang di klaim sebagai bagian dari ilmu eksak. Disisi lain pengembangan kurikulum FIK tidak mewedahi pengembangan ilmu di jurusan-jurusan yang ada. Seperti kita ketahui bahwa jurusan di FIK UNY semuanya jurusan yang mengusung kata pendidikan. Arti kata pendidikan itu harus kita nalar bahwa FIK harus juga mempunyai program studi yang lebih mengarahkan pada pembentukan sumber daya manusia pendidikan baik sebagai

ilmuwan maupun profesi. Kesenjangan terjadi ketika Prodi PJKR yang dipersiapkan untuk membentuk Guru pendidikan jasmani yang profesional terbentur oleh muatan kurikulum yang lebih banyak belum relevan dengan tujuan dimaksud.

Pola dasar yang dipakai pada tingkat pengembangan adalah format kurikulum nasional (Kurnas). Kurnas masih bernalar *subject centered*. Secara segretatif mata kuliah dikelompokkan menjadi: kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), kelompok mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), kelompok mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB), kelompok mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan mata kuliah Berkehidupan Bersama (MBB). Akibat pengelompokan ini, kurikulum FIK 2002 terperangkap ke arah disintegrasi. Ini mengingkari semangat KBK yang menghendaki kurikulum terintegrasi (Dimiyati dkk., 2005). Akibat lanjutan dari format Kurnas ini, pengembangan kurikulum FIK 2002 menjadi terjerembab pada nalar rumpun isi (*subject centered*). Konstrak kurnas yang dijadikan acuan dalam pengelompokan mata kuliah ini jelas menampilkan pola segretatif dan merupakan bentuk lain dari “matrealisasi” kurikulum, ini merupakan antitesis dari KBK. Kerangka dan substansi kurikulum FIK yang terdiri dari kelompok mata kuliah universitas (28 SKS), mata kuliah fakultas (79 SKS) dan mata kuliah prodi Penjas/PJKR (37 SKS) merepleksikan gambaran itu (Dimiyati dkk, 2005).

Adanya mata kuliah-mata kuliah yang kurang relevan dengan kompetensi guru pendidikan jasmani mengakibatkan keberadaan mata kuliah itu kurang bermanfaat bagi para calon guru pendidikan jasmani. Mata kuliah tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah menghilangkan mata kuliah-mata kuliah yang seharusnya ada untuk calon guru penjas. Secara struktur substansi kurikulum FIK sebanyak 79 sks adalah mata kuliah yang bersifat fakultatif, hal ini berarti sebanyak 55 % sks di ampu oleh fakultas. Dari struktur itu mengakibatkan hanya 37 sks matakuliah yang bersifat prodi Penjas. Hal ini sangat berbenturan dengan kenyataan rumpun ilmu pendidikan jasmani yang kurang mempunyai relevansi dengan kurikulum FIK 2002.

Kurang fleksibelnya kurikulum S1 PJKR mengakibatkan perlu adanya pengembangan yang luas dikarenakan adanya berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Disahkannya Undang-undang Guru dan Dosen mengakibatkan perlu adanya penyesuaian kurikulum dengan UU tersebut. Persyaratan Guru harus lulusan S1 mengakibatkan perlunya dibuat kurikulum calon guru pendidikan jasmani baik di

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama maupun Atas. Fleksibilitas kurikulum memang merupakan syarat kurikulum yang baik karena dengan permeabilitas itu program studi dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kemajuan IPTEK-nya. Pada akhirnya Kurikulum yang fleksibel dapat menghasilkan kompetensi lulusan yang sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat pengguna (*Stakeholders*).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas bahwa kurikulum S1 PJKR yang digunakan sekarang belum mampu mengungkap kompetensi para calon guru pendidikan jasmani yang seharusnya. Kurikulum itu juga belum mampu memfasilitasi kebutuhan dan masukan masyarakat. Hal ini berawal dari struktur kurikulum yang memang belum memberikan kompetensi dan juga memfasilitasi kebutuhan dan masukan dari masyarakat. Sehingga dapat dituliskan permasalahan dalam kajian ini bahwa bagaimana struktur kurikulum S1 PJKR FIK UNY berdasarkan relevansinya dengan kompetensi lulusan dan masukan masyarakat?

### **RELEVANSI KURIKULUM S1 PENDIDIKAN JASMANI DAN KOMPETENSI**

Masalah kompetensi profesional guru merupakan salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Kompetensi-kompetensi lainnya adalah kompetensi kepribadian dan kompetensi kemasyarakatan. Kompetensi-kompetensi tersebut saling menjalin terpadu dalam diri guru (Oemar Hamalik, 2004). Lebih lanjut Oemar Hamalik (2004) mengemukakan bahwa guru yang terampil mengajar tentu harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan *social adjustment* dalam masyarakat. Begitu pentingnya kompetensi, maka kurikulum pendidikan guru harus disusun atas dasar kompetensi yang diperlukan oleh setiap guru. Tujuan program pendidikan, sistem penyampaian, evaluasi, dan sebagainya hendaknya direncanakan sedemikian rupa agar relevan dengan tuntutan kompetensi guru secara umum.

Landasan hukum yang dijadikan sebagai pijakan bagi pengembangan kurikulum berbasis kompetensi untuk pendidikan guru adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS). UU SISDIKNAS mengamanatkan bahwa pendidikan nasional harus memiliki standar mutu agar mampu membawa bangsa Indonesia ke dalam pergaulan internasional dalam posisi seimbang

dengan bangsa-bangsa lain, yang berarti bahwa perlu adanya standar nasional pendidikan yang digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Amanat tersebut bukan merupakan sebaris kata yang ditulis dalam sebuah kertas kemudian dijadikan undang-undang, tetapi juga harus dapat dilaksanakan secara baik dan benar oleh seluruh pihak yang bernaung dalam undang-undang tersebut. Jelas bahwa kompetensi merupakan sebuah amanat yang harus diimplementasikan dalam berbagai keperluan pengembangan, termasuk pengembangan kurikulum pendidikan guru.

Melihat pasal 14 UU SISDIKNAS yang mencantumkan jenjang Pendidikan Formal terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Lebih lanjut diterangkan bahwa Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Hal ini menjelaskan bahwa pendidikan guru untuk jenjang pendidikan formal harus mengacu pada jenjang pendidikan tersebut di atas. Guru pendidikan jasmani harus mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang studi pendidikan jasmani untuk jenjang pendidikan formal.

Lain halnya dengan Undang-undang Guru dan Dosen (UU Guru & Dosen) yang secara gamblang menyebutkan pada pasal 2 ayat 1 bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kemudian pada pasal 8 disebutkan Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Begitu pula dengan Pasal 9 yang menyebutkan Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Serta yang sangat berhubungan dengan pembahasan ini adalah Pasal 10 ayat 1 berbunyi Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi, sedangkan pasal 10 ayat 2 berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal itu memberikan penjelasan bahwa guru bukan merupakan pekerjaan yang setiap orang bisa melainkan harus mempunyai kompetensi tertentu yang didapat dari studi secara berkelanjutan di perguruan tinggi.

Salah satu Implikasi dari UU SISDIKNAS yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah *Higher Education Long Term Strategies* (HELTS: 2003-2010). Kebijakan yang terdapat dalam HELTS mengenai pendidikan guru adalah peningkatan kualitas guru pendidikan dasar dan menengah yang tentu saja tidak hanya menyangkut kualifikasi formal melainkan dan terutama menyangkut pula kemampuan atau kompetensi nyata yang dimiliki guru/calon guru. Hal itu menekankan bahwa Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sebagai salah satu pendekatan dalam pengembangan kurikulum pendidikan termasuk Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Melalui pendekatan ini diharapkan akan dapat dihasilkan calon-calon guru yang memiliki perangkat kompetensi sebagaimana yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Acuan formal yang dikembangkan dalam pengembangan kurikulum LPTK adalah Kepmendiknas No.232/U/2000 dan No. 045/U/2002 serta mengacu pula pada Dinamika Kebutuhan Masyarakat dan Globalisasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS). Berdasarkan Kepmendiknas tersebut dapat diangkat tiga karakteristik pokok kurikulum pendidikan tinggi, termasuk LPTK, yaitu: (1) kurikulum berbasis kompetensi; (2) mengandung kurikulum inti yang diberlakukan secara nasional; dan (3) dikembangkan bersama-sama dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau *Stakeholders*. Hal ini menjelaskan bahwa kompetensi merupakan hal utama dalam pengembangan kurikulum pendidikan guru, termasuk guru pendidikan jasmani.

Kurikulum program studi penjas mengandung dua komponen pokok, yaitu: komponen kurikulum inti yang diberlakukan secara nasional dan komponen yang dikembangkan oleh masing-masing institusi. Sehingga pengembangannya mencakup dua tahapan pokok yaitu: (1) pengembangan kurikulum inti; dan (2) pengembangan

kurikulum program studi (Kurikulum Utuh). Berdasarkan pengembangan kurikulum inti, terbentuk Kompetensi Utama yang merupakan seperangkat kompetensi yang mutlak diperlukan untuk melaksanakan dengan tepat tugas-tugas profesionalnya sebagai guru penjas. Kompetensi utama inilah yang mencerminkan tujuan pokok program studi yang harus dicapai oleh lulusan program studi pendidikan jasmani. Berdasarkan pengembangan kurikulum utuh program studi penjas akan dapat dicapai kompetensi pendukung dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama. Kompetensi pendukung merupakan perangkat kompetensi yang berfungsi meningkatkan kemantapan pelaksanaan tugasnya sebagai guru penjas, untuk mengukuhkan kompetensi utama. Sedangkan kompetensi lain merupakan kompetensi tambahan yang dapat melengkapi kompetensi utamanya sebagai guru penjas. Proporsi kompetensi utama yang dicapai melalui kurikulum inti program studi ditetapkan antara 40 – 80 % dari keseluruhan kompetensi yang harus dicapai melalui kurikulum utuh program studi. Proporsi kompetensi pendukung berkisar antara 20 – 40 % dari keseluruhan kompetensi, sedangkan proporsi kompetensi lain berkisar antara 0 – 30 %. Kurikulum utuh program studi dikembangkan oleh masing-masing LPTK dengan mengacu pada kurikulum inti (standar nasional) yang dikembangkan melalui kerjasama antar program studi penjas di lingkungan LPTK, dengan melibatkan pula pihak *Stakeholders*.

Standar Kompetensi Guru Pemula lulusan program studi Pendidikan Jasmani jenjang strata satu (SKGP Penjas S1) dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bidang, yaitu: (1) penguasaan bidang studi; (2) pemahaman tentang peserta didik; (3) penguasaan pembelajaran yang mendidik; (4) pengembangan kepribadian dan keprofesionalan. Pengembangan kompetensi berdasarkan UU SISDIKNAS yang dicantumkan dalam Pasal 10 ayat 1 berbunyi Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dasar keilmuan yang bersifat humaniora dan dasar keilmuan yang bersifat eksakta perlu dipertimbangkan untuk mendukung pendidikan jasmani sebagai sebuah ilmu dan profesi. Melalui pendekatan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi mata kuliah dikembangkan atas dasar jenis dan muatan pengalaman belajar yang diperlukan dalam pembentukan suatu kompetensi yang secara pragmatik dirancang untuk membangun profil utuh kompetensi

lulusan. Oleh karena itu beban sks mata kuliah ditentukan berdasarkan tuntutan pencapaian kompetensi yang secara programatik proporsional sesuai dengan “ruang kurikulum” (*curriculum space*) yang tersedia. Kurikulum berbasis kompetensi menuntut pelaksanaan kurikulum yang memobilisasi seluruh dimensi proses pembelajaran untuk menghasilkan pembentukan kompetensi dalam diri peserta didik calon guru pendidikan jasmani.

### **RELEVANSI KURIKULUM S1 PENDIDIKAN JASMANI DAN MASUKAN MASYARAKAT**

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan amat diperlukan. Bahwa segenap lapisan masyarakat memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam semua aspek pengelolaan pendidikan disemua jenis dan jenjang karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, penyelenggara pendidikan, dan masyarakat. Aris Pongluturan dan Theresia K. Ibrahim (2002) menyatakan bahwa ada strategi pelaksanaan pengikutsertaan masyarakat terhadap pendidikan yaitu, mereorganisasi sistem dalam administrasi dan keuangan, melaksanakan manajemen berbasis sekolah, dan melaksanakan pendidikan berbasis masyarakat.

UU SISDIKNAS mengamanatkan mengenai perlunya peran serta masyarakat dalam pendidikan, seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat 6 yang berbunyi Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Selain itu di cantumkan pula dalam bagian ketiga UU SISDIKNAS mengenai Hak dan Kewajiban Masyarakat, pada Pasal 8 disebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan dan Pasal 9 yang berbunyi masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini menjelaskan bahwa pendidikan harus dapat mengikut sertakan berbagai kalangan masyarakat dan salah satu peran serta masyarakat adalah dalam pengembangan kurikulum suatu lembaga pendidikan.

Pengembangan kurikulum LPTK mengacu pula pada dinamika kebutuhan masyarakat dan globalisasi Ipteks. Penyusunan kurikulum utuh setiap program studi yang dikembangkan oleh masing-masing LPTK dengan mengacu pada kurikulum inti (Standar Nasional) yang dikembangkan melalui kerjasama antar program studi penjas dilingkungan LPTK, dengan melibatkan pula pihak *stakeholders*. Sehingga perlunya

pengembangan jaringan kerja dengan kelompok pemrakarsa, termasuk *stakeholders*, sangat diperlukan dalam keseluruhan upaya pengembangan kurikulum. Adanya jaringan kerja dengan kelompok ini akan sangat membantu, baik dalam rangka evaluasi dan pemutakhiran kurikulum maupun dalam rangka analisis kebutuhan yang diperlukan pada awal upaya pengembangan kurikulum.

Kurikulum Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) menyiratkan visi untuk menciptakan lulusan dalam bidang keolahragaan dan pendidikan jasmani. Menciptakan suatu komposisi kurikulum yang tepat bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, karena diperlukan sinergi antara lembaga dan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat pengguna atau *stakeholders*, seperti Instansi Pemerintah, Sekolah, Klub Olahraga, maupun Pusat Kebugaran Jasmani. Masyarakat pengguna lulusan prodi pendidikan jasmani tentu merasakan langsung mutu dari lulusan yang dihasilkan. Karena disanalah mereka bekerja dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama berada dibangku kuliah. Kualitas kurikulum akan menentukan kualitas lulusan, sehingga diperlukan kurikulum yang membekali para mahasiswa agar dapat terjun langsung di dunia kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna. Kenyataan yang terjadi adalah kurikulum yang ada kurang mengakomodir tuntutan dunia kerja, yaitu ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang aplikatif. Para lulusan yang bekerja di suatu lembaga yang baru bagi mereka akan menjadi tidak berdaya jika dihadapkan dengan berbagai macam tuntutan dunia kerja yang kurang sesuai dengan keadaan mereka.

Masyarakat pengguna umumnya menginginkan lulusan dari Prodi penjas selain menjadi guru juga harus mempunyai keahlian khusus bidang olahraga tertentu. Kenyataan di lapangan guru pendidikan jasmani tidak hanya mengajar pendidikan jasmani tetapi mereka juga membina olahraga prestasi di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Para guru pendidikan jasmani umumnya tidak menguasai cabang olahraga tertentu secara mahir yang berakibat tersendatnya pembinaan prestasi olahraga di sekolah. Menanggapi hal tersebut di atas diperlukan suatu perubahan kurikulum yang membentuk mahasiswa agar memiliki keahlian olahraga khusus disamping keahlian mengajar. Misalnya dengan menciptakan mata kuliah olahraga keahlian yang secara khusus membekali para mahasiswa dengan ilmu, pengetahuan, dan praktik cabang olahraga secara kontinyu dan menjadi salah satu bidang keahliannya yang lain.



Mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih cabang olahraga keahlian sesuai dengan bakat dan minatnya. Dengan begitu lulusan Prodi Penjas memiliki kompetensi lain disamping kompetensi mengajar yaitu penguasaan salah satu cabang olahraga.

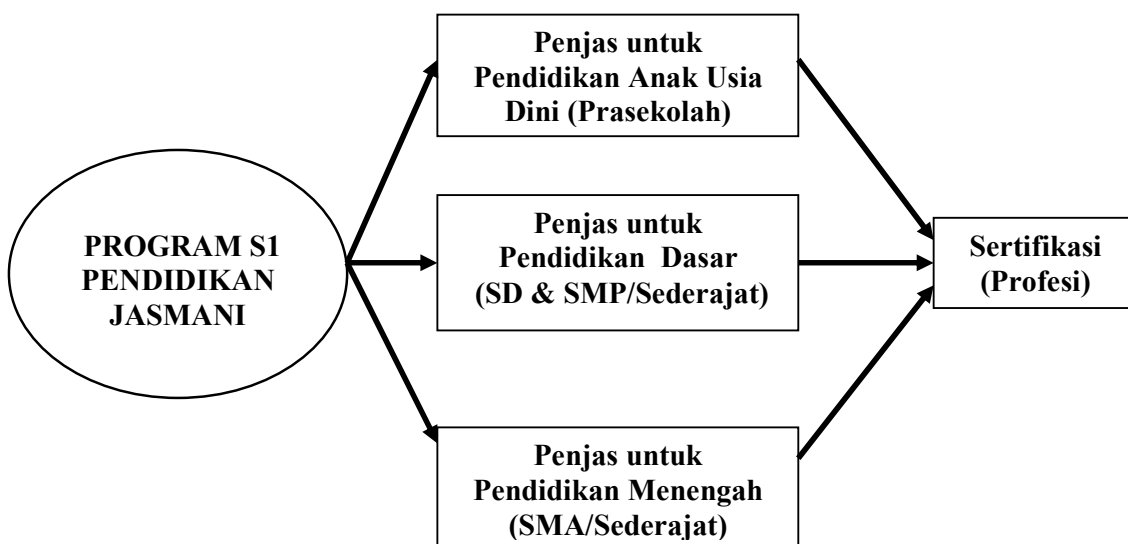
Para *stakeholders* juga menggaris bawahi mengenai kemampuan administrasi para lulusan Prodi Penjas. Pada umumnya, administrasi yang tidak teratur, tidak disiplin dalam membuat rencana pembelajaran merupakan sebagian contoh kelemahan mereka. Para *stakeholders* juga memberikan masukan agar para mahasiswa dibekali dengan kompetensi kewirausahaan terutama yang berkaitan dengan bidang mereka. Kemampuan berwirausaha ini akan diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka, karena jika hanya mengandalkan pada mengajar saja tentunya tidaklah mencukupi. Kemampuan ini juga akan mendorong pertumbuhan iklim industri olahraga. mewujudkan semua itu memang bukanlah pekerjaan yang mudah, diperlukan kajian yang tepat guna mewujudkannya. Penambahan mata kuliah baru dalam bidang bisnis olahraga dan pembinaan keahlian cabang olahraga khusus merupakan harga mati. Perbaikan sikap mental para mahasiswa melalui mata kuliah kerohanian juga harus diperhatikan. Semua itu dilakukan agar para lulusan mempunyai *bargaining position* atau daya tawar yang tinggi di kalangan masyarakat pengguna. Dengan meningkatnya daya tawar diharapkan para masyarakat pengguna akan lebih menerima kehadiran para Prodi Penjas.

### **STRUKTUR KURIKULUM S1 PENDIDIKAN JASMANI BERDASARKAN KOMPETENSI DAN MASUKAN MASYARAKAT**

Sesuai dengan amanat yang disampaikan dalam UU SISDIKNAS bahwa pendidikan formal terdiri atas Pendidikan Dasar (SD – SMP dan Sederajat), Pendidikan Menengah (SMA dan Sederajat), dan Pendidikan Tinggi (Institut, Universitas, Sekolah Tinggi, dll). Hal ini mengimplikasikan bahwa program pendidikan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta mengacu pada ketentuan dimaksud. Penyelenggaraan program Pendidikan Guru Strata Satu (S1) yang dilakukan oleh LPTK untuk membentuk guru-guru yang profesional dan kompeten juga harus diarahkan pada amanat yang disampaikan UU SISDIKNAS sebagai payung hukum yang mendasari penyelenggaraan berbagai program. Program pendidikan guru tersebut jelas diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan guru pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tidak terkecuali program S1 pendidikan jasmani yang juga harus

diarahkan pada pemenuhan kebutuhan guru pendidikan jasmani pada tingkat pendidikan dasar, yaitu: Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar (SD) dan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, serta pemenuhan kebutuhan guru pendidikan jasmani pada tingkat pendidikan menengah, yaitu: Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Menengah atas (SMA) atas sederajat

Penyelenggaraan program S1 pendidikan jasmani dimulai dengan terlebih dahulu menyusun suatu kurikulum yang jelas mengenai program tersebut. Selain harus mengacu pada jenjang pendidikan di atas, karena hal ini berhubungan dengan kompetensi, juga harus mengacu pada kebutuhan masyarakat yang didapat dari hasil kemitraan yang berkelanjutan dengan masyarakat penggunaan lulusan (*stakeholders*). Implikasinya bahwa struktur kurikulum S1 pendidikan jasmani tersebut harus dapat memuat berbagai mata kuliah yang mengarah pada pemenuhan standar kompetensi guru pendidikan jasmani dan juga mata kuliah yang dapat memfasilitasi berbagai dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan ipteks. Struktur kurikulum tersebut harus secara jelas menggambarkan profil lulusan yang akan dicapai oleh program S1 pendidikan jasmani. Selain sebagai daya tarik program juga akan memberikan kemudahan pengertian bagi masyarakat yang berminat mengembangkan bidang studi pendidikan jasmani baik sebagai ilmu maupun untuk profesi.



**Gambar 1. Penyelenggaraan Program S1 Pendidikan Jasmani**

Kurikulum Pendidikan Dokter yang telah mengidentifikasi keberadaan ilmu dan profesi dapat kita adaptasi pada struktur kurikulum pendidikan jasmani, karena hal ini sesuai dengan UU Guru & Dosen yang mengharuskan guru dan dosen mempunyai sertifikat profesi. Mengadaptasi hal tersebut pada penyelenggaraan program S1 pendidikan jasmani, maka pada tahun pertama mahasiswa diberikan berbagai matakuliah umum yang merupakan dasar-dasar pengetahuan Ilmu Pendidikan Jasmani. Pada tahun berikutnya mahasiswa diberikan keleluasaan untuk memilih peminatan yang diinginkan sesuai dengan penyelenggaraan program pendidikan jasmani untuk Pendidikan Anak Dini Usia (PAUD), Pendidikan dasar (SD – SMP dan sederajat), dan Pendidikan Menengah (SMA dan sederajat) dan mata kuliah-mata kuliah yang disampaikan berikutnya mengacu pada kompetensi yang akan dituju.

Berdasarkan adaptasi yang dilakukan apabila mahasiswa masih belum memiliki peminatan yang pasti tentang bidang ilmu yang hendak didalaminya, kemungkinan tetap terbuka baginya untuk melakukan pertimbangan di tahun pertama. Barulah pada tahun kedua dan seterusnya, mahasiswa dapat memantapkan diri untuk mendalami “spesialisasi” program S1 pendidikan jasmani yang diminatnya. Mahasiswa telah menetapkan diri untuk mengikuti salah satu program pendidikan jasmani yang ditawarkan, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan berbagai mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi program tersebut. Struktur kurikulum fleksibel tersebut tidak menutup kemungkinan pula bagi mahasiswa untuk mengambil program pendidikan jasmani lebih dari satu, sebagai contoh dia mengambil program S1 pendidikan jasmani untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dengan demikian, mahasiswa dapat memperoleh kompetensi untuk menjadi guru pendidikan jasmani diberbagai jenjang pendidikan. Tentunya dengan syarat-syarat kelulusan dari mata kuliah-mata kuliah harus dipenuhi terlebih dahulu. Berdasarkan UU Guru & Dosen, setelah mahasiswa menyelesaikan studinya pada program S1 pendidikan jasmani kemudian mereka harus mengikuti program sertifikasi untuk profesi guru pendidikan jasmani.

Implikasi penyusunan struktur kurikulum S1 pendidikan jasmani adalah mengenai penyebaran mata kuliah-mata kuliah. Berdasarkan Kurikulum FIK tahun 2002 struktur kurikulum S1 pendidikan jasmani terdiri atas: mata kuliah universitas, mata kuliah fakulter, dan mata kuliah perdi pendidikan jasmani. Secara berturut-turut beban Satuan Kredit Semester (SKS) untuk mata kuliah tersebut adalah sebagai berikut: 28

SKS untuk mata kuliah universitas, 79 SKS untuk mata kuliah fakulter, dan 37 SKS untuk mata kuliah Prodi Pendidikan jasmani dengan jumlah keseluruhan beban studi untuk menempuh S1 pendidikan jasmani sebanyak 144 SKS. Secara proporsional hanya sekitar 25,7 % SKS mata kuliah untuk prodi pendidikan jasmani, jelas untuk mencapai kompetensi sebagai guru pendidikan jasmani sangatlah kurang. Adanya mata kuliah yang bersifat universitas dan fakulter memberikan bias interpretasi pada pengelompokan mata kuliah-mata kuliah. Sehingga perlu adanya perubahan pengelompokan mata kuliah yang tidak didasarkan pada kepentingan universitas dan fakultas tetapi pada kepentingan kompetensi dan masukan dari masyarakat.

**Tabel 1. Pengelompokan Mata Kuliah**

NO	KELOMPOK MATA KULIAH	MATA KULIAH
1	<b>Mata Kuliah Dasar Kependidikan</b>	Pengantar ilmu pendidikan Psikologi pendidikan Sosio-antropologi pendidikan Manajemen pendidikan PPL
2	<b>Mata Kuliah Dasar Umum</b>	Pendidikan agama Pendidikan pancasila Pendidikan kewarganegaraan Perspektif global Penulisan karya ilmiah TAS TABS: filsafat ilmu, seminar, makalah. KKN
3	<b>Mata Kuliah Disiplin Ilmu</b>	Dasar-dasar pendidikan jasmani Teori bermain dalam penjas Anatomi manusia Fisiologi manusia Fisiologi latihan Kinesiologi Biomekanika Perkembangan Motorik Dimensi psikologi dalam penjas Dimensi sosiologi dalam penjas Metode penelitian dalam penjas Statiska dalam penjas Administrasi dan organisasi penjas Persiapan profesi guru penjas Pendidikan jasmani adaptif Kebugaran jasmani Aplikasi komputer dalam penjas Keterampilan gerak dasar (atletik, senam, renang, pencak silat, dan permainan) Keselamatan, Pencegahan, dan Perawatan cedera dalam penjas Dasar Kepeleatihan Olahraga Kepeleatihan cabang olahraga* Kewirausahaan dalam penjas dan olahraga Pendidikan kesehatan sekolah

**Tabel 2. Kelompok Matakuliah Pembelajaran Penjas**

<b>Mata Kuliah Pembelajaran Pendidikan Jasmani</b>		
<b>Program S1 Penjas SD</b>	<b>Program S1 Penjas SMP</b>	<b>Program S1 Penjas SMA</b>
Pengembangan kurikulum di SD	Pengembangan kurikulum di SMP	Pengembangan kurikulum di SMA
Strategi pembelajaran penjas di SD	Strategi pembelajaran penjas di SMP	Strategi pembelajaran penjas di SMA
Sarana prasarana penjas di SD	Sarana prasarana penjas di SMP	Sarana prasarana penjas di SMA
Pembelajaran konsep gerak di SD	Pembelajaran konsep gerak di SMP	Pembelajaran konsep gerak di SMA
Pembelajaran keterampilan gerak dasar di SD	Pembelajaran keterampilan gerak dasar di SMP	Pembelajaran keterampilan gerak dasar di SMP
Pembelajaran kebugaran jasmani di SD	Pembelajaran kebugaran jasmani di SMP	Pembelajaran permainan di SMA
Evaluasi pembelajaran penjas di SD	Evaluasi pembelajaran penjas di SMP	Pembelajaran kebugaran jasmani di SMA
Pembelajaran senam di SD	Pembelajaran senam di SMP	Evaluasi pembelajaran penjas di SMA
Pembelajaran atletik di SD	Pembelajaran atletik di SMP	Pembelajaran senam di SMA
Pembelajaran akuatik di SD	Pembelajaran akuatik di SMP	Pembelajaran atletik di SMA
Pembelajaran permainan di SD	Pembelajaran permainan di SMP	Pembelajaran akuatik di SMA
Pembelajaran mikro penjas di SD	Pembelajaran mikro penjas di SMP	Pembelajaran mikro penjas di SMA
Pembelajaran aktivitas luar sekolah di SD	Pembelajaran aktivitas luar sekolah di SMP	Pembelajaran aktivitas luar sekolah di SMA

Pengelompokkan mata kuliah-mata kuliah inilah yang dapat memberikan profil secara tepat pada kompetensi lulusan dan juga memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan perkembangan Ipteks. Pengelompokan mata kuliah harus mengacu pada kompetensi utama guru pendidikan jasmani yang terdiri atas: (1) penguasaan bidang studi; (2) pemahaman tentang peserta didik; (3) penggunaan pembelajaran yang mendidik; (4) pengembangan kepribadian dan keprofesionalan, serta kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan perkembangan Ipteks. Mengacu pada kompetensi tersebut dan mengadaptasi program pengembangan guru profesional yang dikembangkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia (Oemar Hamalik, 2004), maka pengelompokkan mata kuliah sebagai berikut: (1) Mata Kuliah Dasar Kependidikan; (2) Mata Kuliah Dasar Umum; (3) Mata Kuliah Disiplin Ilmu; (4) Mata Kuliah Pembelajaran Pendidikan Jasmani. Berdasarkan pengelompokkan ini diharapkan akan tercapai seperangkat kompetensi guru pendidikan jasmani. Apabila mata kuliah-mata kuliah sebagian masih didasarkan pada kurikulum FIK tahun 2002 dan ditambah sesuai dengan pencapaian kompetensi dan masukan dari masyarakat, pengelompokan tersebut dapat digambarkan pada Tabel 1 di atas. Sedangkan untuk kelompok mata kuliah pembelajaran Pendidikan Jasmani

dapat dilihat pada Tabel. 2. Program S1 pendidikan jasmani menempuh beban studi sebanyak 144 SKS, hal itu ditambah oleh program sertifikasi profesi sebanyak 36 SKS. Penyebaran beban studi untuk tiap kelompok mata kuliah adalah sebagai berikut: (1) Mata Kuliah Dasar Kependidikan 11 SKS; (2) Mata Kuliah Dasar Umum 17 SKS; (3) Mata Kuliah Disiplin Ilmu 79 SKS; (4) Mata Kuliah Pembelajaran Pendidikan Jasmani 36 SKS. Sehingga untuk mencapai profesi guru pendidikan jasmani harus menempuh beban studi sebanyak 180 SKS.

## **KESIMPULAN**

Berbagai acuan dan payung hukum mengamanatkan bahwa penyusunan Kurikulum pendidikan guru harus dilakukan dengan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan juga harus beracuan pada kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini berimplikasi pada penyusunan kurikulum S1 pendidikan jasmani yang juga harus beracuan pada kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya, serta harus juga beracuan pada kebutuhan masyarakat dan perkembangan Ipteks. UU SISDIKNAS, UU Guru dan Dosen, SKGP Penjas, *Higher Education Long Term Strategies (HELTS: 2003-2010)*, dan Kepemendiknas No.232/U/2000 dan No. 045/U/2002 mengusung kompetensi sebagai faktor utama pengembangan kurikulum pendidikan guru, termasuk program S1 pendidikan jasmani. Hal ini dimaksudkan agar guru pendidikan jasmani mempunyai kompetensi secara menyeluruh untuk mencapai profesionalisme dalam bidang pendidikan jasmani. Perlunya program S1 pendidikan jasmani disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan Ipteks agar lulusan dapat mempunyai kompetensi adaptable.

Penyusunan struktur kurikulum yang sesuai dengan kompetensi dan masukan masyarakat merupakan implikasi pertama yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum S1 pendidikan jasmani. Struktur kurikulum inilah yang akan menentukan kualitas lulusan yang dihasilkan. Penyelenggaraan program S1 pendidikan jasmani didasarkan atas struktur kurikulum tersebut akan memberikan arah yang tepat bagi pencapaian amanat yang dicantumkan dalam acuan-acuan dan payung hukum yang berlaku. Pengelompokan mata kuliah yang didasarkan atas pendidikan jasmani sebagai ilmu dan profesi merupakan interpretasi nyata kurikulum yang berdasarkan pada

kompetensi, kebutuhan masyarakat dan perkembangan Ipteks. Beban studi untuk mencapai profesi guru pendidikan jasmani dengan kualifikasi Strata 1 seseorang harus menempuh beban studi sebanyak 180 SKS yang tersebar pada kelompok-kelompok mata kuliah yang sudah sesuai dengan kompetensi dan masukan masyarakat.

Agar pelaksanaan pendidikan di PJKR dapat mengarah pada kompetensi, UU Sisdiknas serta UU Guru Dosen maka perlu dilakukan evaluasi terhadap Kurikulum PJKR 2002 sehingga tepat sasaran dan keluarannya dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu perlu dibuat kurikulum untuk spesifikasi yang mengacu pada Pendidikan Dini Usia (Prasekolah), Pendidikan Dasar (SD-SMP/Sederajat), dan Pendidikan Menengah (SMA/Sederajat).

## DAFTAR PUSTAKA

- Aris Pongtuluran dan Theresia K. Ibrahim. 2002. *Pendekatan Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Jurnal Pendidikan Penabur No. 01
- Dimiyati, dkk. 2005. *Rasionalitas dan Tujuan Serta Strategi Pengembangan Kurikulum Prodi PJKR Berbasis Kompetensi Berdasar Masukan Lembaga Mitra*. Disampaikan Pada Seminar Sosialisasi Pengembangan Kurikulum Prodi PJKR Berdasarkan Kompetensi dan Masukan Masyarakat. Yogyakarta: Prodi PJKR Jurusan POR FIK UNY.
- Djohar. 1999. *Reformasi dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- GINUS PARTADIREDJA. 2002. *School of Medical Sciences di Fakultas Kedokteran (Mungkinkah?)*. Yogyakarta: Fakultas Kedokteran UGM. Available online at [http://www.tempo.co.id/medika/arsip/082002/top\\_1htm](http://www.tempo.co.id/medika/arsip/082002/top_1htm)
- Kurikulum 2002 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta
- Laporan Bank Dunia. 1998. *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery*. Jeneva: World Bank
- Oemar Hamalik. 2004. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Otago School of Medical Sciences. 2001. *Undergraduate Information* (booklet). Dunedin, New Zealand: Faculty of Medicine, University of Otago.
- Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Jasmani. 2004. *Pola Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tenaga Kependidikan Program Studi Pendidikan Jasmani*

*Jenjang S1*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Tim Pengembang Nasional SKGP Penjas S1.2004. *Standar Kompetensi Guru Pemula Program Studi Pendidikan Jasmani Jenjang S1*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.